

EVALUASI INTERNAL TRIWULAN III



TA. 2020



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah. Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Evaluasi Internal Pemerintah Triwulan III oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng dapat disusun.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng pada Triwulan III tahun 2020, telah menjalankan kewenangan kegiatannya sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai. Bahan Laporan ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk perencanaan kegiatan pada Triwulan IV yang akan datang.

Terimakasih kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang berharga bagi pihak yang berkepentingan..

Watansoppeng, 6 Oktober 2020

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Soppeng**



[Signature] **Drs.H. DIPA, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680102 199603 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Program dan Kegiatan.....	1
B. Faktor-Faktor yang terkait Kinerja.....	8
Bab II. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	11
Bab III. Penutup	12
A. Kesimpulan.....	15
B. Saran.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Program dan Kegiatan

Adapun dalam pelaksanaannya secara umum kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sudah sesuai target kinerja yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA 2020), baik dilihat dari sisi pengelolaan keuangan bidang pendapatan maupun belanjanya. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

Terlaksananya program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.8.881.374.770,- dapat terealisasi sebesar Rp.5.250.792.185,- atau 59.12% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, hasil yang dicapai adalah tersedianya prasarana utama penunjang kerja. Jumlah anggaran Rp.5.575.887.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.948.125.866,- atau 70.81%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 75.00%.
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan dinas/operasional, hasil yang dicapai adalah terciptanya peningkatan pelaksanaan tugas-tugas operasional. Jumlah anggaran Rp. 38.598.350,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.172.310,- atau 49.67%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.
- 3) Penyediaan Layanan kebersihan kantor, hasil yang dicapai adalah terciptanya peningkatan kebersihan kantor. Jumlah anggaran Rp.422.055.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 261.066.815,- atau 61.86%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 76.23%.
- 4) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, hasil yang dicapai adalah terciptanya penerangan bangunan kantor. Jumlah anggaran Rp.28.069.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.412.500,- atau 15.72%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 46.31%.

- 5) Penyediaan peralatan rumah tangga, hasil yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Jumlah anggaran Rp.2.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 00.00%.
- 6) Penyediaan bahan logistik kantor, hasil yang dicapai adalah terpenuhinya bahan logistik kantor. Jumlah anggaran Rp.1.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 72.73%.
- 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, terjadinya pelaksanaan koordinasi dan percepatan realisasi pemungutan PAD. Jumlah anggaran Rp.364.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 96.167.500,- atau 26.42%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 76.92%.
- 8) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, hasil yang dicapai adalah terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan peningkatan intensitas pelaksanaan tugas. Jumlah anggaran Rp.604.075.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.389.317.300,- atau 64.45%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 81.41%.
- 9) Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor, hasil yang dicapai jumlah jangka waktu ketersediaan informasi terupdate (informasi/berita). Jumlah anggaran Rp. 0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 00.00%.
- 10) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, hasil yang dicapai adalah jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan. Jumlah anggaran Rp.60.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 00.00%.
- 11) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, hasil yang dicapai adalah jumlah jenis pengadaan perlengkapan yang diadakan. Jumlah anggaran Rp.86.045.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.

- 12) Pengadaan peralatan gedung kantor, hasil yang dicapai tersedianya jumlah jenis pengadaan peralatan yang diadakan. Jumlah anggaran Rp.295.859.320,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.158.359.320,- atau 53.53%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 57.46%.
- 13) Pengadaan Meubeleur, hasil yang dicapai tersedianya sarana dan prasarana kantor. Jumlah anggaran Rp.35.970.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.970.000,- atau 100.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.
- 14) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, hasil yang dicapai terwujudnya bangunan yang layak fungsi. Jumlah anggaran Rp.104.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 00.00%.
- 15) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional, hasil yang dicapai tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi. Jumlah anggaran Rp.147.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.70.131.524,- atau 47.71%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 69.39%.
- 16) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, hasil yang dicapai tersedianya peralatan gedung kantor yang layak fungsi. Jumlah anggaran Rp.15.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,- atau 6.67%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.
- 17) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, hasil yang dicapai terwujudnya sarana dan prasarana yang layak fungsi. Jumlah anggaran Rp.369.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.202.684.100,- atau 54.91%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 57.97%.
- 18) Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi, hasil yang dicapai tersedianya aplikasi yang layak fungsi. Jumlah anggaran Rp.682.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.500.000,- atau 5.50%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 16.50%.
- 19) Pengadaan mesin / kartu absensi, hasil yang dicapai adalah tersedianya mesin absensi. Jumlah anggaran Rp.34.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp.16.500.000,- atau 47.83%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 95.65%.

- 20) Pembinaan kepegawaian, hasil yang dicapai adalah tersedianya data – data kepegawaian. Jumlah anggaran Rp.10.575.000,- dengan realisasi anggaran Rp.5.444.950,- atau 51.49%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 52.72%.
- 21) Sosialisasi peraturan perundang – undangan, hasil yang dicapai adalah jumlah peserta sosialisasi. Jumlah anggaran Rp. 0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 00.00%.
- 22) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, hasil yang dicapai meningkatnya pengetahuan/keterampilan PNS. Jumlah anggaran Rp.4.940.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.940.000,- atau 100.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.

2. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan keuangan perangkat daerah dengan 4 (empat) kegiatan dan jumlah anggaran Rp.34.161.875,- dapat terealisasi Rp.14.755.675,- atau 43.19% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan yang tepat waktu. Jumlah anggaran Rp. 18.090.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.281.850,- atau 40.25%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 53.90%.
2. Penyusunan dokumen pelaporan kinerja, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen pelaporan yang tepat waktu. Jumlah anggaran Rp.5.275.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.586.675,- atau 49.04%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 92.89%.
3. Penyusunan dokumen pelaporan keuangan, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu. Jumlah anggaran Rp.6.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.175.900,- atau 47.76%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.

4. Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi. Jumlah anggaran Rp.4.146.875,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.711.250,- atau 41.27%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 53.96%.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 19 (sembilan belas) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.1.972.541.700,- dapat terealisasi Rp.797.580.500,- atau 40.43% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan standar satuan harga, hasil yang dicapai adalah tersedianya buku standarisasi harga satuan barang dan jasa. Jumlah anggaran Rp.92.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.400.000,- atau 9.12%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 87.60%.
- 2) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, hasil yang dicapai tersedianya peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Jumlah anggaran Rp.325.335.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.034.500,- atau 4.93%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.
- 3) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD, hasil yang dicapai tersedianya peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020. Jumlah anggaran Rp.59.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.641.500,- atau 11.12%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.
- 4) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, hasil yang dicapai tersedianya peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Jumlah anggaran Rp.822.680.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.532.245.000,- atau 64.70%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 76.52%.

- 5) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD, hasil yang dicapai tersedianya peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2020. Jumlah anggaran Rp.67.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.34.006.425,- atau 50.31%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 89.90%.
- 6) Penyusunan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, hasil yang dicapai tersedianya perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Jumlah anggaran Rp.67.826.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.54.520.900,- atau 80.38%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.
- 7) Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, hasil yang dicapai tersedianya perbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Jumlah anggaran Rp.40.740.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.644.675,- atau 87.49%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.
- 8) Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait, hasil yang dicapai tersedianya data sinkronisasi & rekonsiliasi pengelolaan dana transfer. Jumlah anggaran Rp.10.237.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.210.000,- atau 21.59%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 58.12%.
- 9) Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, hasil yang dicapai terselesaikannya kasus kerugian Negara/Daerah. Jumlah anggaran Rp. 155.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.
- 10) Penyusunan rancangan perundang – undangan, hasil yang dicapai jumlah rancangan peraturang perundang – undangan tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah (Ranperpu). Jumlah anggaran Rp.78.275.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 00.00%.

- 11) Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan, hasil yang dicapai terciptanya pelayanan keuangan yang efektif dan efisien. Jumlah anggaran Rp.62.607.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.34.025.000,- atau 54.35%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 71.96%.
- 12) Sosialisasi APBD pokok dan perubahan, hasil yang dicapai terciptanya pemahaman masyarakat tentang APBD. Jumlah anggaran Rp.22.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,- atau 33.33%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.
- 13) Penyusunan standar biaya umum, hasil yang dicapai tersedianya standar biaya umum. Jumlah anggaran Rp.11.850.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.
- 14) Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, hasil yang dicapai tersedianya laporan keuangan yang akuntabel. Jumlah anggaran Rp.2.825.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.
- 15) Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa, hasil yang dicapai tersedianya laporan keuangan desa yang akuntabel. Jumlah anggaran Rp.0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 00.00%.
- 16) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun kabupaten, hasil yang dicapai tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah anggaran Rp.36.375.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 50.00%.
- 17) Penyusunan laporan keuangan semesteran kabupaten, hasil yang dicapai tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis kabupaten. Jumlah anggaran Rp.61.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.39.060.000,- atau 63.80%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.

- 18) Pengelolaan gaji dan tunjangan PNSD, hasil yang dicapai terkelolanya gaji PNSD secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat orang. Jumlah anggaran Rp.24.940.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.795.000,- atau 51.30%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 66.16%.
- 19) Peningkatan manajemen pengelolaan kas daerah, hasil yang dicapai terkelolanya kas daerah secara proporsional dan terkendali. Jumlah anggaran Rp.30.575.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.497.500,- atau 47.42%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 69.26%.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 (lima) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.761.008.525,- dapat terealisasi Rp.208.161.950,- atau 27.35% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan barang milik daerah, hasil yang dicapai tersedianya laporan milik daerah. Jumlah anggaran Rp.97.115.725,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.138.800,- atau 23.83%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 67.65%.
- 2) Penjualan dan penghapusan barang milik daerah, hasil yang dicapai tersedianya data laporan BMD yang akan dijual dan dihapuskan. Jumlah anggaran Rp.77.364.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.31.072.700,- atau 40.16%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 87.06%.
- 3) Penilaian aset daerah, hasil yang dicapai tersedianya data nilai aset daerah. Jumlah anggaran Rp.82.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 41.86%.
- 4) Pengamanan aset-aset pemerintah daerah, hasil yang dicapai terciptanya keamanan aset-aset pemerintah daerah. Jumlah anggaran Rp.503.205.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.153.526.650,- atau 30.51%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.

- 5) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, hasil yang dicapai terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel. Jumlah anggaran Rp.423.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.423.800,- atau 100.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 100.00%.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan 4 (empat) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.916.702.599,- dapat terealisasi Rp.377.643.250,- atau 41.20% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan barang cetakan/benda berharga, hasil yang dicapai tersedianya barang cetakan/benda berharga. Jumlah anggaran Rp.313.102.599,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.193.664.000,- atau 61.85%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 86.23%.
- 2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, hasil yang dicapai meningkatnya Pendapatan asli daerah. Jumlah Anggaran Rp.423.375.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.153.790.400,- atau 36.32%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 78.66%.
- 3) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah, hasil yang dicapai meningkatnya pendapatan asli daerah. Jumlah Anggaran Rp.62.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.25.964.650,- atau 41.44%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 75.00%.
- 4) Pembentukan dan pemuktahiran basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah, hasil yang dicapai tersedianya data bangunan objek pajak dan retribusi daerah yang valid. Jumlah anggaran Rp.117.575.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.224.200,- atau 3.59%. Sedangkan realisasi fisik triwulan III sebesar 96.26%.

B. Faktor- Faktor yang terkait Kinerja**a) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja.**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain :

1. Adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI)
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan
5. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang terintegrasi antara e-Planning, e-Budgeting dan e-Monev
6. Tidak dipungut biaya pelayanan
7. Kesopanan, keramahan, Kecepatan dan Ketepatan jadwal pelayanan
8. Melakukan jemput bola, petugas turun di setiap kecamatan
9. Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas
10. Pencapaian yang baik atas sasaran Kinerja berdasarkan Tupoksi
11. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
12. Pelaksanaan kegiatan lebih awal, agar di akhir tahun data dapat tersaji lebih cepat.

b) Faktor penghambat Keberhasilan Kinerja

1. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah
2. Sering terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang besarannya tidak bersifat final.
3. Sering terjadinya perbedaan persepsi tentang implementasi ketentuan peraturan dengan aparatur pemeriksa
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi
5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan administrasi,

6. Penempatan pegawai tidak sesuai dengan latar belakang dan kualifikasi pendidikannya
7. Kurangnya keahlian pegawai,
8. Rendahnya kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah Daerah
9. Belum optimalnya manajemen pelaksanaan program/kegiatan strategis sehingga pencapaiannya cenderung belum efektif dan akuntabel

BAB II

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama dan membandingkan antara target dan realisasi.

Bila dibandingkan dengan realisasi dengan target, maka sasaran *Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas* dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2020 dimana realisasi memenuhi kinerja yang ditargetkan sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan target dan realisasi sasaran Tahun 2020

“Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas”

	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
	Penyampaian rencana kerja anggaran OPD, Laporan Keuangan, dan Pelaporan Aset	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
Rata-Rata Persentase Pencapaian Sasaran					100%

Beberapa hal yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran ***Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas*** pada tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Transparansi pengelolaan keuangan, dalam hal ini penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas yang terbuka dan jujur dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan.
 - Transparansi tersebut diaktualisasikan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat 8 Kecamatan sesuai amanah pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya dan publikasi APBD dan APBD-P tahun 2020 pada website Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng melalui link bkpd.soppeng@go.id.
 - Pembahasan APBD oleh Tim Anggaran bersama Bagian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Soppeng
- b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang merupakan alat untuk menjelaskan kinerja finansial terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya.
 - Adanya peraturan daerah, Peraturan Bupati dan ketentuan yang mengikat dan menjadi acuan bagi masing-masing OPD dalam pengelolaan keuangan
 - Adanya Standar Operating Procedure dalam penyelenggaraan urusan keuangan
 - Ketaatan terhadap mekanisme pertanggungjawaban
 - Mekanisme reward dan punishment bagi pihak yang telah dianggap merugikan Negara melalui Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MTGR)
- c. Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran tepat waktu
 Dalam hal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Soppeng memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD dengan melakukan asistensi kesesuaian RKA OPD dengan Standar Biaya Umum (SBU), Rencana Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD)

dan ketepatan penggunaan rekening belanja dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penyampaian Rencana Kerja Anggaran (OPD) Tahun 2020 dapat dikatakan Tepat waktu, didukung oleh surat Edaran Bupati Soppeng Nomor 900/956/BPKPD/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020 tentang Penyampaian RKA-SKPD/RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020.

Disamping itu tercatat bahwa terdapat 34 SKPD yang menyampaikan RKA OPD tepat waktu, dinilai dari tanggal penyeteroran RKA OPD yakni per 15 Agustus 2020.

d. Laporan Keuangan tepat waktu

Hal ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan daerah sehingga bermanfaat bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam pengambilan kebijakan fiskal dan manjerial Pemerintah, serta sebagai bahan pemeriksaan bagi Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal penyusunan Laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng berkewajiban untuk menyusun laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, baik sumber-sumber penerimaan, pungutan pajak maupun pinjaman pemerintah daerah.

e. Laporan aset tepat waktu. Dari 34 SKPD tercatat bahwa jumlah SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan akhir Barang Milik Daerah sebanyak 34 SKPD.

Sebagai Badan pengelola Barang Milik Daerah, BPKPD Kab. Soppeng menunjukkan kinerjanya antara lain :

- Pengamanan fisik Barang Milik Daerah termasuk pengamanan data dan keamanan dari segi hukum (pengsertifikatan)
- Pemanfaatan aset dalam bentuk sewa lahan, ATM, Pinjam Pakai aset (pusat dan daerah).
- Kerjasama infrastruktur KSPI. Peraturan Pelaksanaan kerjasama infrastruktur diatur dalam PMK Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Miik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur. KSPI penerapannya dalam bentuk ketersediaan lahan/tanah, sewa infrastruktur transportasi, dan infrastruktur sumber daya air dan pengairan

- Penghapusan dan pemindatanganan bagi Barang Milik Daerah yang akan dilelang dan dihibahkan. Mekanisme lelang untuk Barang Milik Daerah yang telah dalam kondisi rusak berat melalui lelang terbuka. Sedangkan barang yang telah dihibahkan termaktub dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Monitoring dan evaluasi tertib pencatatan administrasi Barang Milik Daerah setiap OPD, baik Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Persediaan Barang (KPB). Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut tercatat 34 SKPD yang tertib dalam hal pengadministrasian Barang Milik Daerah.

Begitu pula dengan *sasaran meningkatnya efektifitas dan efisensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah* bila dibandingkan dengan target, maka tercapai realisasi dengan persentase capaian sebesar 100% pada tahun 2020 dimana realisasi memenuhi kinerja yang ditargetkan sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan target dan realisasi sasaran Tahun 2020
“Meningkatnya efektifitas dan efisensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah”

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase capaian IKU perangkat daerah	%	100	75	75%
Rata-Rata Persentase Pencapaian Sasaran					75%

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, secara umum rata-rata pencapaian kedua sasaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 100%.

BAB III**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Evaluasi Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020. Pencapaian Realisasi keuangan sebesar 52,91% dan Realisasi Fisik sebesar 78,97%.

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun anggaran 2020 juga terdapat permasalahan yang mengakibatkan realisasi tidak mencapai target. Secara umum hal ini disebabkan karena :

1. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.
2. Pemerintah Daerah masih mengandalkan keuangan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
3. Belum mampu menggali dan mempertahankan sumber daya daerah, dan
4. Masih banyak pengalokasian dana untuk belanja rutin.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng telah melakukan serangkaian program dan kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan agar hambatan/kendala selama pelaksanaannya dapat teratasi dengan baik dan lancar, solusinya antara lain adalah :

1. Sekalipun kekurangan sumber daya merupakan masalah, namun dengan keterbatasan personil yang ada, tetap berusaha untuk dioptimalkan.
2. Mengoptimalkan dan menggali Sumber Daya Daerah untuk meningkatkan pendapatan guna mendukung proses pembangunan daerah.
3. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan.

4. Membuat Analisis Resiko pada kegiatan yang dianggap prioritas dan diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan masyarakat.

Dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 ini harapannya kedepan akan lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian evaluasi internal ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Laporan Evaluasi Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Watansoppeng, 6 Oktober 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG**



Drs. H. DIPA. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199603 1 005



LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2020
TRIWULAN III

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasa lahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
0.00.4.02.01.05	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan										
0.00.4.02.01.05.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6,511,680,000.00	5,340,005,400.00	91.46%	4,883,760,000.00	75.00%	0.00%	3,948,125,866.00	73.93%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	38,598,350.00	38,598,350.00	100.00%	38,598,350.00	70.00%	0.00%	19,172,310.00	49.67%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	422,055,000.00	423,555,000.00	75.96%	321,750,000.00	76.23%	0.00%	261,066,815.00	61.64%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,569,200.00	33,069,200.00	39.31%	13,000,000.00	100.00%	0.00%	4,412,500.00	13.34%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.07	Penyediaan peralatan rumah tangga	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.09	Penyediaan bahan logistik kantor	1,650,000.00	1,650,000.00	72.73%	1,200,000.00	85.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	110,000,000.00	464,000,000.00	60.34%	280,000,000.00	90.00%	0.00%	96,167,500.00	20.73%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	562,475,000.00	630,650,000.00	77.98%	491,800,000.00	87.43%	0.00%	389,317,300.00	61.73%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.18	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.26	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0.00	60,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.28	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0.00	86,045,000.00	100.00%	86,045,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.30	Pengadaan peralatan gedung kantor	158,359,320.00	295,859,320.00	57.46%	170,000,000.00	100.00%	0.00%	158,359,320.00	53.53%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.31	Pengadaan mebeleur	35,970,000.00	35,970,000.00	100.00%	35,970,000.00	100.00%	0.00%	35,970,000.00	100.00%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.34	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000.00	104,000,000.00	20.19%	21,000,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.36	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	102,000,000.00	147,000,000.00	69.39%	102,000,000.00	85.00%	0.00%	70,131,524.00	47.71%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.40	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	15,000,000.00	50.00%	0.00%	1,000,000.00	6.67%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.46	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	214,000,000.00	369,150,000.00	57.97%	214,000,000.00	100.00%	0.00%	202,684,100.00	54.91%	Tidak Ada	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi			Permasa lahan	Rencana Tindak Lanjut	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
0.00.4.02.01.05.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi	150,000,000.00	682,000,000.00	16.50%	112,500,000.00	75.00%	0.00%	37,500,000.00	5.50%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.53	Pengadaan mesin/kartu absensi	16,500,000.00	34,500,000.00	95.65%	33,000,000.00	100.00%	0.00%	16,500,000.00	47.83%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.59	Pembinaan Kepegawaian	6,625,000.00	12,575,000.00	44.33%	5,575,000.00	90.00%	0.00%	5,444,950.00	43.30%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.62	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.05.63	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4,940,000.00	4,940,000.00	100.00%	4,940,000.00	100.00%	0.00%	4,940,000.00	100.00%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.06.10	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	9,750,000.00	19,090,000.00	51.07%	9,750,000.00	85.00%	0.00%	7,281,850.00	38.14%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.06.11	Penyusunan dokumen perencanaan dan penaqnqaran	3,075,000.00	6,775,000.00	72.32%	4,900,000.00	100.00%	0.00%	2,586,675.00	38.18%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.06.12	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	3,700,000.00	7,650,000.00	86.93%	6,650,000.00	85.00%	0.00%	3,175,900.00	41.52%	Tidak Ada	-
0.00.4.02.01.06.13	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	2,237,500.00	5,146,875.00	43.47%	2,237,500.00	85.00%	0.00%	1,711,250.00	33.25%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.										
4.02.4.02.01.01.01	Penyusunan standar Satuan Haraa.	68,900,000.00	91,150,000.00	88.56%	80,725,000.00	90.00%	0.00%	8,400,000.00	9.22%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	655,375,000.00	344,085,000.00	100.00%	344,085,000.00	80.00%	0.00%	16,034,500.00	4.66%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.03	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang peniabarar APBD.	59,750,000.00	59,750,000.00	100.00%	59,750,000.00	80.00%	0.00%	6,641,500.00	11.12%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.04	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	629,500,000.00	820,930,000.00	76.68%	629,500,000.00	90.00%	0.00%	532,245,000.00	64.83%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.05	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	60,775,000.00	67,600,000.00	89.90%	60,775,000.00	90.00%	0.00%	34,006,425.00	50.31%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.06	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.	75,800,000.00	67,826,700.00	100.00%	67,826,700.00	100.00%	0.00%	54,520,900.00	80.38%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.07	Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	53,300,000.00	40,740,000.00	100.00%	40,740,000.00	100.00%	0.00%	35,644,675.00	87.49%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.08	Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.	5,950,000.00	11,087,500.00	53.66%	5,950,000.00	80.00%	0.00%	2,210,000.00	19.93%	Tidak Ada	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi			Permasa lahan	Rencana Tindak Lanjut	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp			%
4.02.4.02.01.01.09	Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.	155,050,000.00	166,750,000.00	92.98%	155,050,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.10	Penyusunan rancangan peraturan-perundang undangan.	0.00	95,975,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.11	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.	58,550,000.00	67,607,500.00	66.64%	45,053,750.00	77.00%	0.00%	34,025,000.00	50.33%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.12	Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00%	22,500,000.00	100.00%	0.00%	7,500,000.00	33.33%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.13	Penyusunan standar biaya umum	8,225,000.00	10,850,000.00	100.00%	10,850,000.00	90.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.14	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.	2,825,000.00	2,825,000.00	100.00%	2,825,000.00	100.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.15	Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa	1,975,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.16	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	28,375,000.00	36,375,000.00	50.00%	18,187,500.00	25.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.17	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	61,225,000.00	61,225,000.00	100.00%	61,225,000.00	100.00%	0.00%	39,060,000.00	63.80%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.18	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	20,475,000.00	24,940,000.00	66.16%	16,500,000.00	80.59%	0.00%	12,795,000.00	51.30%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.01.19	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	26,437,500.00	35,575,000.00	59.52%	21,175,000.00	80.00%	0.00%	14,497,500.00	40.75%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.										
4.02.4.02.01.02.01	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	74,475,000.00	110,278,225.00	59.58%	65,700,000.00	75.00%	0.00%	23,138,800.00	20.98%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.02.04	Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	67,350,000.00	77,364,000.00	87.06%	67,350,000.00	90.00%	0.00%	31,072,700.00	40.16%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.02.05	Penilaian Aset Daerah.	32,900,000.00	82,900,000.00	41.86%	34,700,000.00	60.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.02.07	Pengamanan aset-aset pemerintah daerah	1,117,940,000.00	495,205,000.00	100.00%	495,205,000.00	50.00%	0.00%	153,526,650.00	31.00%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.02.08	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,875,000.00	423,800.00	100.00%	423,800.00	0.00%	0.00%	423,800.00	100.00%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)										
4.02.4.02.01.03.01	Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.	288,102,599.00	313,102,599.00	86.23%	270,000,000.00	100.00%	0.00%	193,664,000.00	61.85%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.03.02	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.	403,250,000.00	459,270,000.00	72.51%	333,024,250.00	91.87%	0.00%	153,790,400.00	33.49%	Tidak Ada	-
4.02.4.02.01.03.03	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.	60,900,000.00	62,650,000.00	75.00%	46,987,500.00	80.45%	0.00%	25,964,650.00	41.44%	Tidak Ada	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi			Permasa lahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan			
							Fisik TTB (%)	Rp	%	
4.02.4.02.01.03.04	Pembentukan dan pemutakhiran Basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.	113,825,000.00	117,575,000.00	96.26%	113,181,250.00	85.50%	0.00%	4,224,200.00	3.59%	Tidak Ada
		12,537,789,469.00	12,565,789,469.00	78.97%	9,922,965,600.00		0.00%	6,648,933,560.00	52.91%	



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jln.Salatungo No. 3 Telp. (0484) 21066 Watansoppeng 90812

Watansoppeng, 05 Oktober 2020

Nomor : 0107/297.aBPKPD/x/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pertemuan**

Kepada
Yth. - Sekretaris Daerah dan Para Kabid
- Kasubag Perencanaan bersama staf
di,-

Watansoppeng

Dalam rangka evaluasi internal lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019, maka diundang Bapak/Ibu untuk mengikuti pertemuan yang in shaa Allah Akan dilaksanakan pada :

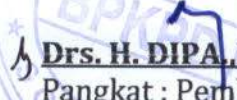
Hari/Tanggal : Selasa/06 Oktober 2020

Pukul : 08.30 Wita s.d selesai

Tempat : Ruang Pertemuan BPKPD

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BPKPD
KABUPATEN SOPPENG,


Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199603 1 005

NOTULEN RAPAT

Agenda : Pertemuan dalam rangka evaluasi Internal Kinerja Tahun 2020
Hari/Tanggal : Selasa/06 Oktober 2020
Waktu Rapat : 08.30 Wita s.d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan
Peserta Rapat : - Sekretaris dan Para Kabid
- Kasubag Perencanaan bersama staf

Kegiatan Rapat :

I. Kata Pembukaan :

Acara dibuka oleh Kepala BPKPD Kab. Soppeng (Drs.H.DIPA,M.Si) pada pukul 08.30 Wita

II. Pembahasan :

- Pencapaian realisasi keuangan pada BPKPD Kab. Soppeng menunjukkan angka 52,91% (sangat tinggi)
- Pencapaian realisasi fisik pada BPKPD Kab. Soppeng menunjukkan angka 78,97% (sangat tinggi)
- Beberapa kegiatan yang tidak terealisasi diantaranya karena adanya refofung anggaran akibat Pandemi Covid-19

III. Penutup :

Rapat ditutup oleh Kepala BPKPD Kab. Soppeng pada pukul 12.00 Wita

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipedomani dan bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

NOTULEN,



ANDI NUR UMAYA,S.E

NIP. 19811006200901 2008



